

SKRIPSI

**DUGAAN PRAKTEK *PREDATORY PRICING* SUBSIDI PENGIRIMAN
ONLINE MARKETPLACE DALAM PERSPEKTIF HUKUM
PERSAINGAN USAHA**



Oleh :

FIRNANDA ARIFATUL CAHYANI

NIM. 031811133078

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA

SURABAYA

2022

**DUGAAN PRAKTEK *PREDATORY PRICING* SUBSIDI PENGIRIMAN
ONLINE MARKETPLACE DALAM PERSPEKTIF HUKUM
PERSAINGAN USAHA**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat untuk Mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

Dosen Pembimbing,



Ria Setyawati, S.H., M.H., LL.M.

NIP. 198008202009122002

Penulis,



Firnanda Arifatul Cahyani

NIM. 031811133078

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

2022

LEMBAR PENGESAHAN

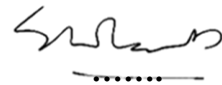
Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Tim Penguji

Pada Tanggal 20 Januari 2022

Tim Penguji Skripsi :

Ketua : 1. Sinar Aju Wulandari, S.H., M.H.

NIP. 197112171995122001



**Anggota : 1. Dr. Zahry Vandawati Chumaida, S.H.,
M.H.**

NIP. 197304031997022001



2. Ria Setyawati, S.H., M.H., LL.M.

NIP. 198008202009122002



3. Masitoh Indriani, S.H., LL.M.

NIP. 198409042008122002



**4. Kukuh Laksono Suminaring Aditya, S.H.,
LL.M.**

NIP. 199009292022013101



LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Firnanda Arifatul Cahyani

NIM : 031811133078

Bidang Minat : Hukum Bisnis

Skripsi : Dugaan Praktek *Predatory Pricing* Subsidi Pengiriman *Online Marketplace* Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi ini tidak mempunyai persamaan dengan skripsi lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Apabila pernyataan ini tidak benar akan diberikan sanksi oleh pimpinan fakultas.

Surabaya, 20 Januari 2022
Yang Membuat Pernyataan



Firnanda Arifatul Cahyani
NIM. 031811133078

ABSTRAK

Perkembangan teknologi melahirkan suatu inovasi baru dalam bidang bisnis dan ekonomi yaitu e-commerce. E-commerce merupakan sebuah wadah bertemunya penjual dan pembeli dalam transaksi jual beli secara online. Semakin meningkatnya jumlah pengguna dan transaksi pada e-commerce menyebabkan semakin terbukanya peluang terjadinya perbuatan persaingan usaha tidak sehat. Perbuatan persaingan usaha tidak sehat ini akan menimbulkan dampak negatif bagi pelaku usaha lain seperti adanya hambatan baru pada pasar bersangkutan sehingga pelaku usaha baru akan kesulitan untuk masuk pasar tersebut. Pelaku usaha e-commerce bersaing untuk menciptakan layanan-layanan yang dapat meningkatkan jumlah penggunanya. Salah satu layanan yang digemari pelanggan ialah subsidi gratis ongkos kirim. Pemberian subsidi ini bergantung pada skala sebuah perusahaan e-commerce. Hal inilah yang kemudian dapat memicu terjadinya *predatory pricing*. Ketentuan mengenai industri e-commerce atau bisnis berbasis internet masih sangat sedikit dan belum diatur secara terperinci. KPPU sendiri sebagai lembaga pengawas persaingan di Indonesia berwenang sebagai investigator, penyidik, pemeriksa, serta penuntut dalam rangka penegakan hukum persaingan usaha pada sektor e-commerce.

Kata Kunci : *E-commerce, Predatory Pricing, Pelaku Usaha, KPPU*

ABSTRACT

The development of technology gave birth to a new innovation in the field of business and economics, namely e-commerce. E-commerce is a place where sellers and buyers meet in online buying and selling transactions. The increasing number of users and transactions in e-commerce causes more opportunities for unfair business competition to occur. This act of unfair business competition will have a negative impact on other business actors, such as new obstacles in the relevant market so that new business actors will find it difficult to enter the market. E-commerce businesses compete to create services that can increase the number of users. One of the services that customers like is the free shipping subsidy. This subsidy depends on the scale of an e-commerce company. This can then trigger predatory pricing. Provisions regarding the e-commerce industry or internet-based businesses are still very few and have not been regulated in detail. KPPU itself as a competition supervisory agency in Indonesia has the authority to act as investigators, investigators, examiners, and prosecutors in the context of enforcing business competition law in the e-commerce sector.

Keywords : *E-commerce, Predatory Pricing, Business Actors, KPPU*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan berkat-Nya, skripsi yang berjudul “Praktek *Predatory Pricing* E-commerce Dalam Prespektif Hukum Persaingan Usaha” ini dapat diselesaikan sebagai tugas akhir mahasiswa sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Melalui kesempatan ini tidak lupa penulis sampaikan rasa terimakasih kepada berbagai pihak yang berperan dalam penyelesaian skripsi ini, diantaranya :

1. Yang Terhormat Iman Prihandono, S.H., M.H., LL.M., Ph.D., Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
2. Yang Terhormat Dr. Enny Narwati, SH., MH., Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
3. Yang Terhormat Dr. Mohammad Syaiful Aris, SH., MH.,LL.M., Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
4. Yang Terhormat Dr. Maradona, SH.,LL.M., Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
5. Yang Terhormat Ria Setyawati, S.H., M.H., LL.M., sebagai dosen pembimbing atas waktu dan masukan serta bimbingannya yang telah diberikan selama proses penyelesaian skripsi ini.
6. Yang Terhormat kedua orang tua saya Tri Sanyoto dan Siti Sundari beserta kakak saya Ekawati Wahyu Rahmadani atas doa dan dukungannya yang

tak pernah berhenti selama penulis menempuh pendidikan sarjana di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

7. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum Universitas Airlangga angkatan 2018.
8. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan motivasi.

Penulis menyadari sepenuhnya masih banyak kekurangan dalam penulisan hasil penelitian ini. Oleh karena itu, penulis membuka diri atas segala kritik dan saran yang dapat membangun dan meningkatkan kualitas skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kepentingan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum dimasa yang akan datang.

Surabaya, 20 Januari 2022

Penulis.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Metode Penelitian	9
1.5.1 Tipe penelitian Hukum	9
1.5.2 Pendekatan Penelitian	10
1.5.3 Sumber Bahan Hukum	11
1.5.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	12
1.5.5 Analisis Bahan Hukum	13
1.6 Sistematika Penulisan	13

BAB II DUGAAN PRAKTEK *PREDATORY PRICING* ONLINE

MARKETPLACE DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN

USAHA.....	15
2.1 Struktur Pasar	15
2.2 Pasar Bersangkutan (<i>Relevant Market</i>)	23
2.3 Posisi Dominan dan Pangsa Pasar	26
2.4 Klasifikasi <i>E-commerce</i>	29
2.5 Perilaku antipersaingan oleh Layanan Penyedia <i>E-commerce</i>	31
2.5.1 Pengertian dan Penjabaran Unsur-unsur <i>Predatory Pricing</i>	
Pada <i>E-commerce</i>	31
2.5.2 Tindakan Pelaku Usaha <i>E-commerce</i> yang dapat Memicu	
<i>Predatory Pricing</i>	43

BAB III BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM DI INDONESIA OLEH KPPU DALAM HAL TERDAPAT INDIKASI *PREDATORY PRICING*

PRICING	51
3.1. Bentuk Perlindungan Hukum Di Indonesia Oleh KPPU Dalam Hal	
Terdapat Indikasi <i>Predatory Pricing</i>	51
3.1.1. Tugas dan wewenang KPPU	51
3.1.2. Pendekatan Yuridis dan Pendekatan Ekonomi dalam	
Penegakan Hukum Persaingan Usaha	56
3.1.3. Proses Pemeriksaan oleh KPPU Dalam Hal Terjadinya	
<i>Predatory Pricing</i>	61
3.2. Perbandingan Penegakan Hukum Persaingan Usaha	

Di Perancis	68
3.3. Urgensi Pembentukan Peraturan Terkait Persaingan Usaha Pada <i>E-commerce</i>	71
BAB IV PENUTUP	75
4.1. Kesimpulan	75
4.2. Saran	76
DAFTAR BACAAN	77

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopli dan

Persaingan Usaha Tidak Sehat

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 6 Tahun 2011 Tentang

Pedoman Pasal 20 (Jual Rugi) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 210/PMK.010/2018 tentang

Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan melalui Sistem

Elektronik;

Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem

Elektronik